

BAB V. SIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Simpulan

Penelitian dengan tujuan menganalisis pengaruh variabel IPM, TIK, TPAK, TPT, dan UMP terhadap Pertumbuhan Ekonomi provinsi di Indonesia dan menganalisis variabel independen yang paling berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi provinsi di Indonesia tahun 2021-2024, menghasilkan beberapa temuan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara bersama-sama variabel IPM, TIK, TPAK, TPT, dan UMP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Secara parsial, variabel IPM, TIK, UMP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sementara variabel TPAK dan TPT tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 2021-2024.
2. Indeks Pembangunan Manusia merupakan variabel independen yang paling berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 2021-2024.

B. Implikasi

Berikut adalah beberapa implikasi yang dapat digunakan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan:

1. Berdasarkan hasil penelitian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 34 provinsi di Indonesia mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2021-2024. Temuan ini mengimplikasikan bahwa penguatan pembangunan manusia, khususnya pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak di wilayah 3T, menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui

pemerataan pada 3 dimensi tersebut akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, sehingga berkontribusi pada pemerataan PDRB per kapita antarwilayah di Indonesia. Kolaborasi pemerintah dengan lembaga atau komunitas sosial menjadi Langkah strategis untuk mempercepat implementasi kebijakan pembangunan manusia dan mengurangi ketidakmerataan ekonomi antarwilayah. Beberapa komunitas yang sudah berjalan seperti, Komunitas Medis Papua Tanpa Batas yang memfokuskan kegiatannya pada aspek kesehatan masyarakat Kampung Omon, Jayapura, Papua, komunitas *Indonesian Youth Education & Social* (I-YES) yang berfokus pada program kegiatan peningkatan kualitas pendidikan pemuda-pemudi di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) dengan metode *fun learning*, komunitas YCAB (Yayasan Cinta Anak Bangsa) yang menyalurkan bantuan kepada ribuan guru di wilayah 3T dan komunitas Sahabat Pedalaman yang mempunyai fokus untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat wilayah 3T melalui program jembatan pelosok negeri dan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat.

2. Berdasarkan hasil penelitian, Teknologi, Informasi, dan Komunikasi yang diukur melalui proporsi penduduk usia produktif dengan keterampilan TIK 34 provinsi di Indonesia dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2021-2024. Temuan ini mengimplikasikan bahwa peningkatan keterampilan TIK dapat mendorong inovasi dan memperkuat kinerja ekonomi daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital memfokuskan kebijakan TIK pada transformasi ekonomi digital melalui program pengembangan 10.000 Desa Digital, perluasan jaringan Palapa Ring, dan pembangunan infrastruktur

BTS 4G melalui proyek (SATRIA-1) di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), bersamaan dengan pembangunan infrastruktur Pusat Data Nasional dan penguatan ekosistem jaringan 5G. Pemerataan infrastruktur TIK diharapkan dapat meningkatkan produktivitas ekonomi daerah, sehingga berkontribusi pada peningkatan dan pemerataan PDRB per kapita antarwilayah.

3. Berdasarkan hasil penelitian, upah minimum 34 provinsi di Indonesia dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2021-2024. Pemerintah perlu menetapkan kebijakan upah minimum yang selaras dengan kondisi atau karakteristik ekonomi dan biaya hidup masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraan tanpa menekan sektor usaha. Kebijakan upah di Indonesia saat ini diimplementasikan melalui upah minimum provinsi yang diatur dalam PP No. 51 2023 Tentang Perubahan Atas PP No. 36 2021 Tentang Pengupahan. Peran lembaga Triparti sebagai forum yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh untuk menjaga keseimbangan kepentingan serta mendorong pemerataan pendapatan antarwilayah di Indonesia. Kebijakan upah minimum yang sesuai dengan kondisi ekonomi mampu meningkatkan daya beli masyarakat secara lebih merata, sehingga akan berkontribusi pada pemerataan PDRB per kapita seluruh provinsi di Indonesia.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak menyertakan wilayah pemekaran provinsi Papua yaitu Papua Selatan, Tengah, Pegunungan, dan Barat Daya dikarenakan kebijakan UU No. 2 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Otonomi baru disahkan pada 17

November 2022, sehingga data yang digunakan dalam penelitian belum tersedia dalam laporan ataupun publikasi.

